

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA

Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018

Komplek Pasar Wisata Kedensari Tanggulangin Sidoarjo
Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perindustrian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidoarjo, Januari 2018
Kepala,

Heru Budi Susanto

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi | 2 |
| Pernyataan Tanggung Jawab | 3 |
| Ringkasan | 4 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 6 |
| II. Neraca | 7 |
| III. Laporan Operasional | 8 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | 9 |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan | 10 |
| A. Penjelasan Umum | 10 |
| B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran | 24 |
| C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca | 28 |
| D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional | 45 |
| E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas | 54 |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya | 58 |
| VI. Lampiran dan Daftar | 59 |

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA
KOMPLEK PASAR WISATA KEDENSARI TANGGULANGIN SIDOARJO
JAWA TIMUR
TELEPON (031) 8855149, FAXIMILE (031) 8856150

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, Januari 2019
Kepala,

Heru Budi Susanto
NIP 196410031988031004

Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp330.010.519 atau mencapai 111.80 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp295.175.000 .

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp12.719.540.771 atau mencapai 98.30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp12.939.007.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.439.049.015 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp503.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.788.606.091; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp649.939.924.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp5.439.049.015.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp327.545.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp13.801.609.197 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp13.474.064.197. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp19.370.019 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp13.454.694.178.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp6.504.212.941 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp13.454.694.178 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12.389.530.252 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp5.439.049.015.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

III. LAPORAN OPERASIONAL

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Tantangan dalam pengembangan IKM alas kaki nasional masih membutuhkan *effort* yang cukup besar. BPIPI (Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia) sebagai salah satu *stakeholder* dalam pengembangan kluster industri alas kaki di Indonesia memegang peranan sentral dalam perkuatan dukungan layanan bagi IKM alas kaki nasional. Perencanaan yang baik dan implementasi program yang tepat sasaran memerlukan dukungan banyak pihak agar mampu memberikan dampak langsung bagi IKM.

Sebuah tantangan sekaligus ancaman. Tergantung perspektif sisi mana kita gunakan sebagai masyarakat industri alas kaki Indonesia. Perspektif ini harus digunakan secara proporsional, karena keduanya (tantangan dan ancaman) akan sangat berguna untuk menyusun strategi kedepan secara sistematis dan terukur.

Perspektif Tantangan, adalah sebuah sudut pandang positif bagaimana melihat masa depan industri alas kaki dari sisi skenario /gambaran /kondisi terbaik yang akan dicapai. Berawal dari titik ini, Industri Alas Kaki harus menyiapkan diri dan potensi internalnya untuk memperoleh manfaat dan nilai tambah sebesar-sebesarnya bagi masyarakat. Diperlukan strategi untuk menangkap peluang di masa depan.

Perspektif Ancaman, sebuah sudut pandang (bukan

negatif) yang melihat masa depan industri alas kaki dari sisi skenario/gambaran/kondisi terburuk yang akan diterima atas konsekuensi perubahan di masa depan.

Volume pasar, sumber daya manusia dan ketersediaan bahan baku merupakan potensi natural yang dimiliki oleh masyarakat industri alas kaki Indonesia. Keunggulan tersebut harus dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh industri lokal dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Namun yang perlu diwaspadai, dalam jangka panjang potensi natural IKM alas kaki nasional (Volume pasar, sumber daya manusia dan ketersediaan bahan baku) tidak bisa menjadi acuan utama strategi pengembangan industri, akan lebih banyak faktor eksternal (tantangan sekaligus ancaman) yang akan mereduksi nilai manfaat potensi tersebut. Faktor eksternal tersebut seperti perubahan demografi, perilaku dan struktur pasar, perkembangan teknologi dan perubahan pada etika dan aturan bisnis bahkan lingkungan.

Dengan tetap konsisten pada rencana strategi lima tahun yang sudah tersusun (2015 – 2019), BPIPI mencoba sebuah pendekatan 5 (lima) pilar strategi organisasi dalam mengimplementasikan strategi tersebut antara lain :

- Pendidikan dan Pelatihan
- Memberikan bantuan konsultasi teknis dan manajemen
- Mengembangkan pusat desain persepatuan
- Memberikan informasi teknologi dan promosi persepatuan

- Memberikan pelayanan pengujian mutu / sertifikasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga
 - Pendapatan Pendidikan Lainnya.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi

berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat

adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|---------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|---|-----------------------------|
| <i>Software</i> Komputer | 4 |
| <i>Franchise</i> | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp. 330.010.519*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp330.010.519 atau mencapai 111,80 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp295.175.000. Pendapatan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya; Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi di Bidang Perindustrian, Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | Per 31 Desember 2018 | | |
|---|----------------------|--------------------|---------------|
| | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % Real Angg. |
| Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan luran Badan Usaha dan Penerimaan Klain Asuransi BMN | - | 800.000 | - |
| Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum | 205.175.000 | 122.002.000 | - |
| Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi | 90.000.000 | 186.337.000 | - |
| Pendapatan Denda | - | 19.206.000 | - |
| Pendapatan Lain-lain | - | 1.665.519 | - |
| Jumlah | 295.175.000 | 330.010.519 | 111,80 |

Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan 110,80 % (persen) dibandingkan periode yang sama di TA 2017. Hal ini disebabkan karena peningkatan Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum; Pendapatan Pendidikan, Budaya,

Riset dan Teknologi dan adanya pendapatan denda.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2018 dan 2017*

| URAIAN | REALISASI TA 2018 | REALISASI TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Pendapatan Jasa | - | 88.786.000 | - |
| Pendapatan Pendidikan | - | 68.096.091 | - |
| Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN. Dan Iuran Badan Usaha | 800.000 | - | - |
| Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum | 122.002.000 | - | - |
| Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi | 186.337.000 | - | - |
| Pendapatan Denda | 19.206.000 | | |
| Pendapatan Lain-lain | 1.665.519 | 250 | - |
| Jumlah | 330.010.519 | 156.882.341 | 110,36 |

Realisasi

Belanja Negara

Rp12.719.540.771

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar Rp12.719.540.771 atau 98.30% dari anggaran belanja sebesar Rp12.939.007.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
TA 2018*

| Uraian | 2018 | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | Anggaran | Realisasi | % Real Angg. |
| Belanja Pegawai | 3.179.325.000 | 3.011.589.850 | 94,72 |
| Belanja Barang | 8.459.682.000 | 8.416.223.671 | 99,49 |
| Belanja Modal | 1.300.000.000 | 1.291.727.250 | 99,36 |
| Total Belanja Kotor | 12.939.007.000 | 12.719.540.771 | 98,30 |
| Pengembalian | - | | - |
| Jumlah | 12.939.007.000 | 12.719.540.771 | 98,30 |

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 24.60 % (persen) dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya realisasi belanja pegawai dan belanja barang.

*Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2018 dan 2017*

| URAIAN | REALISASI TA 2018 | REALISASI TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Belanja Pegawai | 3.011.589.850 | 2.266.175.687 | 32,89 |
| Belanja Barang | 8.416.223.671 | 6.766.439.092 | 24,38 |
| Belanja Modal | 1.291.727.250 | 1.175.594.050 | 9,88 |
| Jumlah | 12.719.540.771 | 10.208.208.829 | 24,60 |

*Belanja
Pegawai
Rp3.011.589.850*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.011.589.850 dan Rp.2.266.175.687. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 32,89 % (persen) dari TA 2017. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan tunjangan kinerja dan penerimaan CPNS baru di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia.

Perbandingan Belanja Pegawai

TA 2018 dan 2017

| URAIAN | REALISASI TA 2018 | REALISASI TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 1.519.441.346 | 1.317.472.140 | 15,33 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS | - | - | - |
| Belanja Honorarium | - | - | - |
| Belanja Lembur | 19.945.000 | 4.223.000 | 372,29 |
| Belanja Vakasi | - | - | - |
| Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito | 1.472.314.678 | 944.481.088 | 55,89 |
| Jumlah Belanja Kotor | 3.011.701.024 | 2.266.176.228 | 32,90 |
| Pengembalian Belanja Pegawai | (111.174) | (541) | - |
| Jumlah Belanja | 3.011.589.850 | 2.266.175.687 | 32,89 |

Belanja

Barang

Rp8.416.223.671

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8.416.223.671 dan Rp6.766.439.092. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 24,38 % (persen) dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya realisasi belanja barang operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dalam negeri.

Perbandingan Belanja Barang

TA 2018 dan 2017

| URAIAN | REALISASI TA 2018 | REALISASI TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Belanja Barang Operasional | 800.462.036 | 675.128.685 | 18,56 |
| Belanja Barang Non Operasional | 1.556.617.882 | 1.886.320.650 | (17,48) |
| Belanja Barang Persediaan | 518.514.510 | 732.354.076 | (29,20) |
| Belanja Jasa | 2.505.885.011 | 1.385.847.775 | 80,82 |
| Belanja Pemeliharaan | 659.669.518 | 437.457.910 | 50,80 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 2.354.388.260 | 1.588.202.326 | 48,24 |
| Belanja Perjalanan Luar Negeri | 20.686.454 | 83.840.495 | - |
| Jumlah Belanja Kotor | 8.416.223.671 | 6.789.151.917 | 23,97 |
| Pengembalian Belanja | - | 22.712.825 | - |
| Jumlah Belanja | 8.416.223.671 | 6.766.439.092 | 24,38 |

Belanja Modal
Rp1.291.727.250

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.1.291.727.250 dan Rp1.175.594.050. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 9,88% dibandingkan TA 2017 disebabkan adanya belanja Modal Lainnya berupa *software* komputer.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

| URAIAN | REALISASI TA 2018 | REALISASI TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.165.417.000 | 1.175.594.050 | (0,87) |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Lainnya | 126.310.250 | 0 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 1.291.727.250 | 1.175.594.050 | 10 |
| Pengembalian | - | - | - |
| Jumlah Belanja | 1.291.727.250 | 1.175.594.050 | 9,88 |

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai

berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2018 dan 2017*

| Keterangan | TA 2018 | TA 2017 |
|------------------------------------|----------|----------|
| Saldo UP | - | - |
| Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan | - | - |
| Jumlah | - | - |

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2018 dan 2017*

| Keterangan | TA 2018 | TA 2017 |
|---------------------------------|----------|----------|
| Uang Tunai | | |
| Bank BERSAMA No.acc 82111487451 | | |
| Jumlah | - | - |

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas

pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2018 dan 2017*

| Keterangan | TA 2018 | TA 2017 |
|--|---------|---------|
| Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | - | - |
| Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan | - | - |
| Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan | - | - |
| Jumlah | - | - |

*Piutang PNBP
Rp0*

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP
TA 2018 dan 2017*

| Uraian | TA 2018 | TA 2017 |
|-----------------|---------|---------|
| Piutang PNBP | - | - |
| Piutang Lainnya | - | - |
| Jumlah | - | - |

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0*

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
TA 2018 dan 2017*

| No | Nama | TA 2018 | TA 2017 |
|---------------|------|---------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Jumlah | | | |

Bagian Lancar **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

TPA

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA
TA 2018 dan 2017*

| No | Nama | 30-Jun-18 | 31-Des-17 |
|---------------|------|-----------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| Jumlah | | - | - |

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang Lancar

Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
TA 2018 dan 2017*

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jk Pendek | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|-------------------------|--------------|------------------|
| Piutang Bukan Pajak | | | |
| Lancar | - | 0,50% | - |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Bagian Lancar TP/TGR | | | |
| Lancar | - | 0,50% | - |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Bagian Lancar TPA | | | |
| Lancar | - | 0,50% | - |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih | - | | - |

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka
TA 2018 dan 2017*

| Jenis | TA 2018 | TA 2017 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Pembayaran Internet | - | - |
| Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin | - | - |
| Pembayaran Sewa Gedung Kantor | - | - |
| Jumlah | - | - |

*Pendapatan
yang Masih
Harus*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar

*Diterima
Rp0*

Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2018 dan 2017*

| Jenis | TH 2018 | TH 2017 |
|--------------------------------------|----------|----------|
| Pendapatan Jasa Pelatihan | - | - |
| Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan | - | - |
| Jumlah | - | - |

*Persediaan
Rp503.000*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp503.000 dan Rp775.100.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
TA 2018 dan TA 2017*

| Jenis | TA 2018 | TA 2017 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Barang Konsumsi | 354.500 | 610.100 |
| Barang untuk Pemeliharaan | - | - |
| Bahan Baku | - | 165.000 |
| Suku Cadang | 148.500 | - |
| Persediaan Lainnya | - | - |
| Jumlah | 503.000 | 775.100 |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
TA 2018 dan 2017*

| No | Debitur | TA 2018 | TA 2017 |
|--------|---------|---------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| Jumlah | | | |

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA
TA 2018 dan 2017*

| No | Debitur | TA 2018 | TA 2017 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Jumlah | | | |

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang Per 31 Desember 2018*

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jk Panjang | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|--------------------------|--------------|------------------|
| Tagihan TP/TGR | | | |
| Lancar | - | 0,50% | - |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Tagihan PA | | | |
| Lancar | - | 0,50% | - |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih | | - | - |

Tanah

C.14 Tanah

Rp0

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai aset tetap berupa tanah seluas 5.500 m² sebesar Rp.0,00 dikarenakan tanah yang dipakai merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang statusnya adalah pinjam pakai. Mutasi transaksi terhadap Tanah pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

| | |
|---|----------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017 | 0 |
| Mutasi tambah: | |
| Pembelian | 0 |
| Mutasi kurang: | |
| Revaluasi aset | - |
| Penyitaan pengadilan | 0 |
| Saldo per 31 Desember 2018 | 0 |

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Per 31 Desember 2018

| No | Luas | Lokasi | Nilai |
|---------------|------|--------|-------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Jumlah | | | |

*Peralatan dan
Mesin*

Rp28.994.068.118

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp28.994.068.118 dan Rp28.338.447.178. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017 | 28.338.447.178 |
| Mutasi tambah: | |
| Pembelian | 1.165.417.000 |
| Hibah Barang | 0 |
| Transfer Masuk | 26.082.000 |
| Koreksi tambah | 0 |
| Mutasi kurang: | 0 |
| Penghentian dari penggunaan | 535.878.060 |
| Saldo per 31 Desember 2018 | 28.994.068.118 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018 | 24.240.023.277 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2018 | 4.754.044.841 |

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa:

- a. Penggunaan kembali Komputer Unit yang telah dihentikan penggunaannya senilai Rp26.082.000.
- b. Penghentian Penggunaan Alat Bengkel Tak Bermesin senilai Rp52.507.000.
- c. Penghentian Penggunaan Alat Kantor senilai Rp105.365.008.
- d. Penghentian Penggunaan Alat Rumah Tangga senilai Rp72.882.552
- e. Penghentian Penggunaan Alat Komunikasi senilai Rp20.350.000.
- f. Penghentian Penggunaan Alat Kedokteran senilai Rp5.250.000.
- g. Penghentian Penggunaan Unit Alat Laboratorium senilai Rp150.623.500.
- h. Penghentian Penggunaan Peralatan Komputer senilai Rp28.948.000.
- i. Penghentian Penggunaan Alat SAR senilai Rp9.500.000
- j. Penghentian Penggunaan Unit Peralatan Proses / Produksi senilai Rp13.130.000
- k. Penghentian Penggunaan Peralatan Olah Raga senilai Rp1.800.000

- l. Pembelian Alat bantu senilai Rp121.000.000
- m. Pembelian Alat Bengkel Bermesin Rp118.877.000
- n. Pembelian Alat Bengkel Tak Bermesin senilai Rp4.400.000
- o. Pembelian Alas Ukur senilai Rp1.045.000
- p. Pembelian Alat Kantor senilai Rp59.070.000
- q. Pembelian Alat Rumah Tangga senilai Rp.123.073.500
- r. Pembelian Alat Studio senilai Rp104.720.000
- s. Pembelian Unit Alat Laboratorium senilai Rp354.978.800
- t. Pembelian Alat Khusus Kepolisian senilai Rp47.465.000
- u. Pembelian Komputer Unit senilai Rp170.305.300
- v. Pembelian Peralatan Komputer senilai Rp47.887.400
- w. Pembelian Alat Kerja Penerbangan senilai Rp4.620.000
- x. Pembelian Unit Peralatan Proses/Produksi senilai Rp7.975.000

*Gedung dan
Bangunan
Rp0*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan seluas 3.500 m² sebesar Rp.0,00 dikarenakan Gedung dan Bangunan yang dipakai Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang statusnya adalah pinjam pakai. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017 | - |
| Mutasi tambah: | |
| - | - |
| Mutasi kurang: | - |
| Saldo per 31 Desember 2018 | - |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018 | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2018 | - |

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp6.000.000*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.000.000 dan Rp6.000.000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini pada Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

| | |
|---|------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017 | 6.000.000 |
| Mutasi tambah: | |
| Penambahan jaringan teknologi informasi | - |
| Mutasi kurang: | - |
| Saldo per 31 Desember 2018 | 6.000.000 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018 | (1.950.000) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2018 | 4.050.000 |

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp30.511.250*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp30.511.250 dan Rp30.511.250. Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

| | |
|---|-------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017 | 30.511.250 |
| Mutasi tambah: | |
| - | 0 |
| Mutasi kurang: | |
| - | 0 |
| Saldo per 31 Desember 2018 | 30.511.250 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018 | 0 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2018 | 30.511.250 |

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp24.241.973.277*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp24.241.973.277 dan Rp22.690.605.336. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2018

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 28.994.068.118 | 24.240.023.277 | 4.754.044.841 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 6.000.000 | 1.950.000 | 4.050.000 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 30.511.250 | 0 | 30.511.250 |
| Akumulasi Penyusutan | | 29.030.579.368 | 24.241.973.277 | 4.788.606.091 |

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp2.013.899.250*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp2.013.899.250 dan Rp1.887.589.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017 | 1.887.589.000 |
| Mutasi tambah: | 126.310.250 |
| Pembelian | - |
| Mutasi kurang: | - |
| Saldo per 31 Desember 2018 | 2.013.899.250 |
| Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2018 | (1.363.959.326) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2018 | 649.939.924 |

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2018

| Uraian | Nilai Perolehan |
|---|----------------------|
| Software Original Ruizhou (RecardVer2008) | 419.540.000 |
| Adobe CS6 | 25.685.000 |
| Microsoft Office | 4.950.000 |
| Recad Software Design Pattern | 145.596.000 |
| Type 2D Recad Software | 75.130.000 |
| Crispin Lastmaker | 140.407.000 |
| Crispin Shoemaker Pro | 330.773.000 |
| Crispin Engineer Pro (Grading) | 274.189.000 |
| Shoe Cost 2D Delcam Crispin | 163.185.000 |
| Crispin Pattern Cut | 60.359.000 |
| Ruizhoi | 61.875.000 |
| Sole Engineer procost 2D Delcam Crispin | 185.900.000 |
| Adobe in Design | 7.653.250 |
| Adobe Photoshop | 7.590.000 |
| Adobe After Effects | 7.716.500 |
| Adobe Premiere Pro | 7.716.500 |
| Sketch Up Pro 2018 | 12.144.000 |
| 2D Shoe Pattern | 75.900.000 |
| Adobe Illustrator | 7.590.000 |
| Jumlah | 2.013.899.250 |

Aset Lain-Lain **C.22 Aset Lain-Lain**

Rp0

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp0 dan Rp41.532.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

| | |
|--|-------------------|
| Saldo per 31 Desember 2017 | 41.532.000 |
| Mutasi tambah: | |
| - reklasifikasi dari aset tetap | 606.093.111 |
| Mutasi kurang: | |
| - penggunaan kembali BMN yang dihentikan | |
| - penghapusan BMN | 647.625.111 |
| Saldo per 31 Desember 2018 | - |
| Akumulasi Penyusutan | |
| Nilai Buku per 31 Desember 2018 | - |

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp1.363.959.326*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp1.363.959.326 dan Rp1.110.036.251. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

| Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi | Nilai Buku |
|--|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Akumulasi Amortisasi Software | 2.013.899.250 | 1.363.959.326 | 649.939.924 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2.013.899.250 | 1.363.959.326 | 649.939.924 |

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal

pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

| Uraian | Jumlah | Penjelasan |
|--------------|--------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | - | |

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Adapun rincian Pendapatan Diterima di Muka pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

| Uraian | Jumlah |
|--------------|--------|
| | |
| | |
| Total | - |

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2018 dan 2017*

| Uraian | TA 2018 | TA 2017 |
|--|---------|---------|
| Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar | | |
| Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar | | |
| Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar | | |
| Jumlah | - | - |

*Ekuitas
Rp5.439.049.015*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.439.049.015 dan Rp6.504.212.941. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP
Rp.327.545.000.*

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp327.545.000 dan Rp156.882.091. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

TA 2018 dan 2017

| URAIAN | TA 2018 | TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga | 0 | 88.786.000 | - |
| Pendapatan Pendidikan Lainnya | 0 | 68.096.091 | - |
| Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian | 122.002.000 | 0 | - |
| Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan | 186.337.000 | 0 | - |
| Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 19.206.000 | 0 | - |
| Jumlah | 327.545.000 | 156.882.091 | 109 |

Pendapatan Pengujian berasal dari jasa pengujian laboratorium alas kaki, sedangkan Pendapatan Pendidikan berasal dari jasa pelatihan tentang alas kaki.

Beban

Pegawai

Rp3.011.589.850

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.011.589.850 dan Rp2.266.175.687. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

TA 2018 dan 2017

| URAIAN | TA 2018 | TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beban Gaji Pokok PNS | 1.057.150.140 | 927.243.000 | 14 |
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 20.258 | 16.803 | 21 |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 88.961.260 | 72.228.910 | 23 |
| Beban Tunj. Anak PNS | 23.637.144 | 20.585.960 | 15 |
| Beban Tunj. Struktural PNS | 40.320.000 | 27.360.000 | 47 |
| Beban Tunj. PPh PNS | 1.542.750 | 367.166 | 320 |
| Beban Tunj. Beras PNS | 69.595.620 | 63.584.760 | 9 |
| Beban Uang Makan PNS | 177.773.000 | 157.295.000 | 13 |
| Beban Tunj. Umum PNS | 60.330.000 | 48.790.000 | 24 |
| Beban Uang Lembur | 19.945.000 | 4.223.000 | 0 |
| Beban Pegawai (Tunj Khusus/Kegiatan) | 1.472.314.678 | 944.481.088 | 56 |
| Jumlah | 3.011.589.850 | 2.266.175.687 | 33 |

*Beban
Persediaan
Rp525.246.185*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp525.246.185 dan Rp638.437.948. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

TA 2018 dan 2017

| URAIAN | TA 2018 | TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 151.900.610 | 90.964.799 | 67 |
| Beban Persediaan Bahan Baku | 373.200.575 | 547.473.149 | - |
| Beban Persediaan Lainnya | 145.000 | 0 | - |
| Jumlah | 525.246.185 | 638.437.948 | -18 |

Beban Barang dan Jasa
Rp4.862.964.929

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.862.964.929 dan Rp3.947.297.110. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena meningkatnya beban keperluan perkantoran, beban honor operasional satker, beban bahan, beban langganan telephone, beban langganan daya dan jasa lainnya, beban jasa konsultan, beban sewa, beban jasa profesi, dan beban jasa lainnya. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2018 dan 2017

| URAIAN JENIS BEBAN | TA 2018 | TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Keperluan Perkantoran | 592.842.036 | 488.078.685 | 21,46 |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 197.940.000 | 161.640.000 | 22,46 |
| Beban Barang Operasional Lainnya | 9.680.000 | 25.410.000 | (61,90) |
| Beban Bahan | 1.018.161.334 | 810.109.950 | 25,68 |
| Beban Honor Output Kegiatan | 140.382.000 | 467.100.000 | (69,95) |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 398.074.548 | 609.110.700 | (34,65) |
| Beban Langganan Listrik | 131.105.877 | 133.853.700 | (2,05) |
| Beban Langganan Telepon | 16.539.826 | 16.112.008 | 2,66 |
| Beban Langgan Daya dan Jasa Lainnya | 20.111.044 | 15.653.567 | 28,48 |
| Beban Jasa Konsultan | 384.120.000 | 0 | - |
| Beban Sewa | 148.658.264 | 44.954.500 | 230,69 |
| Beban Jasa Profesi | 811.800.000 | 379.100.000 | 114,14 |
| Beban Jasa Lainnya | 993.550.000 | 796.174.000 | 24,79 |
| Jumlah | 4.862.964.929 | 3.947.297.110 | 23,20 |

*Beban
Pemeliharaan
Rp670.114.443*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp670.114.443 dan Rp483.620.085. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Meningkatnya beban pemeliharaan karena adanya kenaikan realisasi pemeliharaan gedung dan bangunan, beban pemeliharaan peralatan dan mesin, dan beban persediaan bahan untuk persediaan. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2018 dan 2017*

| URAIAN JENIS BEBAN | TA 2018 | TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 321.347.672 | 185.984.675 | 72,78 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 234.530.196 | 155.120.410 | 51,19 |
| Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan | 56.141.675 | 49.380.000 | 13,69 |
| Beban Persediaan suku cadang | 58.094.900 | 93.135.000 | (37,62) |
| Jumlah | 670.114.443 | 483.620.085 | 38,56 |

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp2.375.074.714*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.375.074.714 dan Rp1.672.042.821. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Meningkatnya beban perjalanan dinas disebabkan oleh kenaikan frekuensi rapat koordinasi dan kegiatan BPIPI yang dilaksanakan di luar

kota. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2018 dan 2017*

| URAIAN JENIS BEBAN | TA 2018 | TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 798.581.259 | 574.927.674 | 38,90 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 23.810.000 | 24.840.000 | (4,15) |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 789.360.590 | 648.708.695 | 21,68 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 742.636.411 | 339.715.957 | 118,61 |
| Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri | 20.686.454 | 83.840.495 | 0,00 |
| Jumlah | 2.375.074.714 | 1.672.032.821 | 42,05 |

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat TA 2018 dan 2017*

| URAIAN JENIS BEBAN | TA 2018 | TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|--|----------|----------|----------------------|
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | | | |
| Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | | | |
| Jumlah | 0 | 0 | |

*Beban
Bantuan
Sosial
Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial

TA 2018 dan 2017

| URAIAN JENIS BEBAN | TA 2018 | TA 2017 | % NAIK (TURUN) |
|--|----------|----------|----------------|
| Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial | | | |
| Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial | | | |
| Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial | | | |
| Jumlah | 0 | 0 | |

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp2.356.619.076*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.356.619.076 dan Rp2.503.758.744. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2018 dan 2017*

| URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | TA 2018 | TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 2.061.014.001 | 2.153.167.767 | (4,28) |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | - | - | |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan | 150.000 | 150.000 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | - | - | |
| Jumlah Penyusutan | 2.061.164.001 | 2.153.317.767 | (4,28) |
| Beban Amortisasi Software | 295.455.075 | 350.440.977 | (15,69) |
| Beban Penyusutan aset lain-lain | - | - | |
| Jumlah Amortisasi | 295.455.075 | 350.440.977 | (15,69) |
| Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi | 2.356.619.076 | 2.503.758.744 | (5,88) |

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2018 dan 2017*

| URAIAN JENIS BEBAN | TA 2018 | TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|--|----------|----------|----------------|
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar | | | |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar | | | |
| Jumlah | 0 | 0 | |

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp19.370.019

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan 2017

| URAIAN | TA 2018 | TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|--|-------------------|------------------|----------------------|
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 800.000 | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 20.402.919 | 4.322.250 | - |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | (1.832.900) | 2.893.600 | - |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan*) | 0 | 0 | - |
| Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | 0 | 0 | - |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | 19.370.019 | 1.428.650 | 1255,83 |

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).

Pos Luar Biasa
Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2018 dan 2017

| URAIAN | TA 2018 | TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|--|----------|----------|----------------------|
| Pendapatan PNPB | | | |
| Beban Perjalanan Dinas | | | |
| Beban Persediaan | | | |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | 0 | 0 | |

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp6.504.212.941

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.504.212.941 dan Rp7.805.596.435.

Defisit LO
Rp13.454.694.178

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp13.454.694.178 dan Rp11.380.659.982. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih
Revaluasi Aset

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang

Tetap Rp0 muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp27.950.000. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp12.389.540.252

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.389.530.252 dan Rp10.208.208.829. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

| Transaksi Antar Entitas | Nilai |
|--|-----------------------|
| Diterima dari Entitas Lain | (330.010.519) |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 12.719.540.771 |
| Transfer Masuk | - |
| Transfer Keluar | - |
| Pengesahan Hibah Langsung | - |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | - |
| Jumlah | 12.389.530.252 |

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp330.010.519 sedangkan DKEL sebesar Rp12.719.540.771.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0 terdiri dari:

| No | Jenis | Entitas Asal | Nilai |
|-----------|---------------|---------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | Jumlah | | |

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

| No | Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Nilai Hibah |
|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Total Pengesahan | | | Rp - |
| Pengesahan Pengembalian Hibah | | | Rp - |
| Jumlah | | | Rp - |

Ekuitas Akhir
Rp5.439.049.015

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.439.049.015 dan Rp6.504.212.941

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH
TANGGAL NERACA**

-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

-

